

Kawal Keuangan Negara BPK Gandeng Jurnalis



Agus Wahyuni
Borneo Tribune, Pontianak

Mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dari penyimpangan anggaran ibarat karpet merah dan kertas putih. Sama-sama bersih. Ketika selempang kertas jatuh ke atas karpet dianggap menjadi kotor.

Persepsi itu diluruskan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Pontianak memba-

Hernold Fery M, Adi Sudibyo dan Fatkhurrokhman FOTO Agus Wahyuni / Borneo Tribune

ngun kemitraan bersama puluhan awak Jurnalis di Kalbar mewujudkan penyelenggaraan keuangan daerah bersih dari penyimpangan, Senin (21/2) di Hotel Mercure, Pontianak.

Pertemuan dua pilar demokrasi, BPK dan Jurnalis itu baru pertama kali dilakukan sejak 2005 Kantor BPK Perwakilan Pontianak berdiri di Kalbar.

Hampir seuruh jajaran BPK terlibat pada pertemuan itu. Sebut saja Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Adi Sudibyo, Kasubbaud Kalbar I, Hernold Fery M, dan Kasubagsetkalan, Fatkhurrokhman sekaligus moderator pertemuan bersama Jurnalis Kalbar.

BPK Gandeng Jurnalis

Banyak hal baru yang didapat jurnalis dalam pertemuan itu. Mulai dari pengetahuan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara yang independen dan profesional hingga kecurangan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran.

Hernold Fery M menegaskan, BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan karena diatur dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2006. Di Kalbar, selain BPK masih ada lembaga lain tugasnya sama dengan BPK, yakni BPKP. Tapi lembaga ini turunan dari sejarah order baru.

Saat itu, setiap kali BPKP melakukan pemeriksaan keuangan daerah harus disensor oleh bidang Sekretaris Negara sebelum di-

sampaikan ke DPR. Setelah reformasi hal itu tidak berlaku lagi. Sehingga banyak penyelesaian kasus penyimpangan anggaran sampai ke pengadilan selalu kandas karena data kerugian negara diaudit oleh BPKP bukan BPK.

"Sampai sekarang masih ditemukan penegak hukum menentukan kerugian negara menggunakan data BPKP ketika berhadapan dipersidangan," kata Hernold. Karena BPKP sudah lama bekerjasama dengan penegak hukum sejak zaman order baru.

Adi Sudibyo mencatat, sepanjang 2004, BPK Kalbar menemukan sekitar 4.000 temuan, setengahnya sudah diproses dengan penemuan tindak lanjut. Jenis pemeriksaan meliputi, keuangan,

kinerja dan PDPT.

Permasalahannya, masih banyak temuan SKPD daerah telat melaporkan keuangan negara. Sehingga setiap tahun hasil audit BPK merekomendasikan tindak lanjut dari temuan sekurang-kurangnya 60 hari dari rekomendasi yang disampaikan.

"Lewat dari itu dianggap temuan tindak pidana penyimpangan anggaran dan diteruskan kepada penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan," kata Sudibyo.

Biasanya modus kecurangan dalam siklus anggaran temuan BPK dilampirkan, mulai dari perencanaan anggaran, penetapan di legislatif, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pemerintah.

Seperti melakukan mark up dan volume dalam rencana pekerjaan. Merekayasa kegiatan untuk pembiayaan kegiatan pimpinan. Mereka,ayasa spesifikasi teknis dimiliki oleh konsorsium atau perusahaan tertentu.

Penetapan anggaran di legislatif juga begitu. Seperti mengusulkan kegiatan baru yang tidak direncanakan pemerintah. Meminta jatah pekerjaan atau jatah jatah uang pengesahan dan lobi anggaran dengan kompensasi pekerjaan.

Di tingkat pelaksanaan anggaran, biasanya pelaksanaan pekerjaan volume diturunkan, harga dinaikkan. Rekayasa pekerjaan fiktif dan kualitas barang pengadaan rendah sehingga memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Bahkan

pertanggung jawaban anggaran pemerintah sering ditemukan laporan dan rekayasa bukti fiktif atau dibuat tidak lengkap.

Bagaimana dengan tanggapan media? Jawabannya hanya satu. Buka akses seluas-luasnya data temuan kepada media membantu fungsi pengawasan dan kontrol penggunaan anggaran. Karena hampir semua jurnalis mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses data laporan keuangan BPK setiap kali melaporkan ke DPRD.

"Demi mewujudkan penyelenggaraan keuangan negara bersih dari penyimpangan merupakan tugas bersama semua elemen masyarakat, dan salah satunya adalah para pekerja pers," kata salah satu jurnalis harian di Pontianak. □